Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)
Vol. 7, No. 1 (2025): 370-383
ISSN: 2685-1393 (p); ISSN: 2685-1466 (e)
Publisher: Sekolah Tinggi Teologi Injili dan Kejuruan (STTIK) Kupang
DOI: 10.37364/jireh.v7i1.432 Available Online at https://ojs-jireh.org/index.php/jireh

Sakralitas Relasi sebagai Respon Kegiatan Industri berdasarkan Konsep *Human Ecological Triangle*

Ricky Pramono Hasibuan[1], Mikael Harianja[2]
[1]Sekolah Tinggi Teologi HKBP
[2]Universitas Kristen Duta Wacana
Email: rickyhasibuan@stt-hkbp.ac.id[1]; mikaelharianja01@gmail.com[2]

Abstract
Industrial activity is often perceived as a threat to environmental sustainability and sociocultural order, especially when it involves the exploitation of indigenous lands and resources. One case that has led to prolonged conflict is the operation of PT Toba Pulp Lestari (TPL) in Toba Regency, which has significantly affected the local ecosystem and the social relations of the Batak Toba community. This article aims to offer an ethical and theological framework based on the concept of sacred relationality within Batak Toba culture as a critical and constructive response to industrial realities. Using a qualitative descriptive analytical approach, the study is carried out in three stages: an empirical assessment of the social and ecological impacts of TPL's operations, a theoretical exploration of the Human Ecological Triangle, and contextual theological reflection that integrates public theology with the local value system of Dalihan na Tolu. The findings reveal that sacred relationality, understood as the mutual connection between humans, nature, and the Divine, provides a normative foundation for developing an industrial order that is just, sustainable, and oriented toward the integrity of creation and the dignity of local communities. This relational model rejects exploitative frameworks and affirms the importance of collective responsibility in shaping a just public sphere.

Keywords: dalihan na tolu; ecology; human ecological triangle; industry; sacred relationality

Abstrak
Kegiatan industri sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan dan tatanan sosial-budaya, khususnya ketika melibatkan eksploitasi atas tanah dan sumber daya komunitas adat. Salah satu kasus yang menimbulkan konflik panjang adalah operasi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Kabupaten Toba, yang berdampak pada ekosistem lokal dan relasi sosial masyarakat Batak Toba. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan kerangka etis dan teologis berbasis sakralitas relasi dalam budaya Batak Toba, sebagai upaya membangun tanggapan kritis dan konstruktif terhadap realitas industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan tiga tahap: kajian empiris terhadap dampak sosial dan ekologis PT. TPL, telaah teoritis atas konsep *Human Ecological Triangle*, serta kontekstualisasi melalui integrasi teologi publik dan nilai-nilai lokal, yakni *Dalihan na Tolu*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sakralitas relasi yang menghubungkan manusia, alam, dan Yang Ilahi secara timbal balik dapat menjadi dasar etis untuk membangun tata hubungan industri yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada keutuhan ciptaan serta martabat komunitas lokal. Relasi ini menolak pendekatan eksploitatif dan menegaskan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam ruang publik.

Kata Kunci: dalihan na tolu; ekologi; human ecological triangle; industri; sakralitas relasi

Article History:
Received: 13 Mei 2025
Accepted: 18 Juni 2025
Published: 30 Juni 2025

Pendahuluan

Kegitan Industri sebagai bentuk dalam pembangunan ekonomi, seringkali mendapat stigma negatif, karena dianggap hanya mencari keuntungan semata. Hal tersebut terjadi karena kegiatan industri dipandang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan solidaritas sosial. Namun, Yaya Wijaya berpendapat bahwa kegitan pembanguan ekonomi tersebut dapat memiliki peran positif, terutama jika dijalankan dengan prinsip-prinsip etis. Kegiatan industri, sebagai bentuk pencarian keuntungan, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi pribadi atau segelintir orang, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan bersama. Para wirausahawan yang sukses seringkali memadukan kerja keras, kreativitas, dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan, sehingga bisnis mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada dampak sosial yang lebih luas dan kelestarian lingkungan. Sehingga aspek terpenting dalam kegitan industri harus memperhatikan: keuntungan, keberlanjutan lingkungan dan solidaritas sosial (Wijaya, 2021). Berdasarkan hal ini, maka kegiatan industri tidak bisa ditolak serta-merta apabila mencakup ketiga perhatian tersebut.

Di tengah realitas saat ini, banyak kegitan industri yang memainkan peranan penting terutama di Indonesia. Salah satunya adalah industri yang dijalankan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL) secara khusus di Kabupaten Toba. PT. TPL memiliki otensi ekonomis yang sangat berar, namun sering kali dibayangi oleh dampak negatif. PT. TPL tidak hanya menguasai area hutan tanaman industri (HTI) yang luas, tetapi juga menggunakan lahan dan hutan adat tanpa melibatkan masyarakat setempat dalam proses konsultasi atau persetujuan, bahkan menebangi hutan kemenyan yang menjadi bagian dari warisan adat. Aktivitas perusahaan, termasuk perusakan hutan alam dan ekspansi perkebunan ke wilayah-wilayah yang dilindungi, telah memicu konflik sosial dan membahayakan kehidupan komunitas lokal. Selain itu, kerusakan lingkungan yang terjadi diperburuk oleh kebijakan pemerintah daerah yang korup dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak ekologis. Penebangan liar dan deforestasi yang didorong oleh tingginya permintaan global terhadap komoditas berbasis sumber daya alam, seperti kayu, dan bubur kertas, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat setempat, memperburuk kerusakan lingkungan, memicu bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor, serta mengancam ekosistem yang menjadi habitat orangutan Sumatra. Semua ini tak hanya memperdalam kemiskinan masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi pada pemanasan global dan kerugian ekonomi akibat tata kelola hutan yang tidak berkelanjutan (Pakpahan, 2022).

PT. TPL yang sebelumnya Bernama PT. Inti Indorayon Utama, beroperasi sejak 1986 di bawah Raja Garuda Mas, telah melakukan berbagai pelanggaran, termasuk pencemaran, perampasan tanah, dan perambahan hutan, hingga menelan korban jiwa. Meski presiden BJ Habibie dan Megawati sempat menghentikan operasionalnya, pabrik ini tetap bertahan dengan berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari. PT. TPL menjanjikan teknologi ramah lingkungan dan kemitraan yang menguntungkan, namun pelanggaran masa lalu tidak pernah diberi sanksi hukum. Konflik struktural antara negara dan rakyat terus berlanjut selama hampir tiga dekade, dengan perjuangan masyarakat yang belum sepenuhnya mencapai hasil maksimal (Siregar, 2020).

Merujuk pada Sejarah dan perkembangan berjalanngan PT. TPL saat ini, nampaknya suara-suara yang dalam rangka untuk menutup industri tersebut akan sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini berusaha mengkaji mengenai bagaimana posisi teologis dalam hal memberikan negosiasi pada isu tersebut dengan menganalisa relasi PT. TPL dengan sekitarnya. Penulis dengan demikian mendasari penelitian ini dengan memakai pendekatan teologi publik.

Penulis mendasari pemahaman mengenai teologi publik dari pemiran J. B. Banawiratma dan Yahya Wijaya. Teologi publik, sebagaimana dijelaskan oleh Banawiratma berfungsi sebagai dialog kritis yang melibatkan tradisi Kristen, disiplin ilmu lain, serta komunitas lintas agama. Banawiratma menekankan pentingnya integrasi perspektif teologis dengan berbagai realitas sosial, budaya, dan ekologis untuk membangun tanggung jawab etis yang relevan dan transformatif serta bersifat holistik (Banawiratma, 2023). Sementara itu, Yahya Wijaya menyoroti bahwa teologi publik mengambil isu-isu publik sebagai titik tolak konstruksi teologis yang relevan untuk pembentukan kebijakan publik. Bersifat lintas disiplin, teologi publik memanfaatkan sumber-sumber teologis untuk menanggapi persoalan secara realistis dan menghindari sikap yang utopis, sehingga cenderung bersifat negosiatif ketimbang konfrontatif (Wijaya, 2021). Melalui teologi publik, kegiatan Industri PT. TPL tidak hanya dilihat dari kacamata ekonomi, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai moral dan keadilan. Konsep keadilan sosial dalam tradisi teologis, seperti keadilan distributif dan keberlanjutan ekologis, menjadi pijakan untuk mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan industri. Merujuk pada kedua pandangan tersebutlah, maka penting menggali wawasan publik sebagai sumber dalam menanggapi kegiatan industri. Maka, penulis berpendapat penting untuk mengkaji bagaimana pandangan Richard Evanoff dalam menanggapi realitas industri yang menekankan tiga hal poin yang ditekankan oleh Wijaya, namun berangkat dari wawasan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji mengenai sakralitas relasi sebagai landasan kegiatan industri. Penulis akan melakukaan beberapa langkah dalam penelitian. *Pertama,* menguraikan pandangan mengenai aktivitas dan respon terhadap kegiatan Industri PT. TPL. Pada langkah pertama ini, penulis membaginya kedalam dua tahap, yakni mengkaji bagaimana kegiatan PT. TPL berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraaan, dan sosial budaya. Serta menganalisa respon dari *civil society* terhadap industri yang dilakukan PT. TPL. Data penelitian yang penulis pakai pada langkah pertama ini adalah data empiris yang bersifat sekunder yang diterbitkan hingga tahun 2024. Penulis mengumpulkan hasil penelitian empiris yang berhubungan dengan pembahasan mengenai PT. TPL. *Kedua,* menganalisa pandangan Richard Evanoff mengenai *human ecological triangle* yang dikembangkannya melalui konsep Bioregionalisme dan teori transaksional. Ketiga, Penulis akan melakukan kontekstualitasi dengan membangun teologi publik mengenai sakralitas realasi sebagai repon terhadap kegiatan industri. Pada langkah ketiga ini, penulis akan menganalisa hasil yang didapatkan dari langkah pertama dan kedua. Dalam melakukan pengembangannya penulis melakukan pembacaan terhadap yang dikembangkan oleh Emanuel Gerrit Singgih berdasarkan permikiran Evanoff dengan konsep *Dalihan na Tolu* dalam budaya Batak Toba.

Hasil dan Pembahasan

Dampak dan Respon terhadap Aktivitas Industri PT. TPL di Kabupaten Toba

Keberlanjutan Lingkungan

PT. TPL fokus pada penanaman pohon Ekaliptus dalam sistem monokultur, yang memiliki dampak negatif besar bagi lingkungan, seperti penyederhanaan lanskap, hilangnya habitat spesies, peningkatan konsumsi air, erosi, dan degradasi tanah. Praktik ini juga sering melibatkan penggunaan pupuk dan pestisida sintetis secara berlebihan, yang menyebabkan polusi (Indradewa, 2021). Dampak lingkungan ini menyebabkan konflik agraria, terutama akibat penebangan pohon dan penggantian tanaman asli seperti kemenyan dengan Ekaliptus. Dulu, Tanah Batak dikenal sebagai penghasil kemenyan terbesar di Indonesia, namun saat ini jumlah hutan kemenyan semakin berkurang karena ditebangi dan digantikan

dengan Ekaliptus, sehingga mengurangi produksi kemenyan (Simamora, 2024). Meskipun demikian, ada pembelaan TPL untuk ini yang menyatakan bahwa Ecalyptus dapat berdampingan dengan tumbuhan cabai. Akan tetapi, hal ini tidak terlalu kuat untuk membuktikan bahwa pengelolaan lahan oleh TPL tidak monokultur. Sebab, tidak ada jenis pohon yang ditanam berdampingan dengan Ecalptus (Dasril, t.t.).

Dampak dari deforestasi massal di sekitar Danau Toba selama tiga dekade terakhir telah sangat luas, terlihat dari berbagai bencana lingkungan seperti banjir bandang yang merenggut nyawa, merusak harta benda, dan menghancurkan lahan pertanian. Beberapa contoh bencana ini terjadi di Kabupaten Samosir, seperti di Desa Sabulan dan Ransang Bosi, Kecamatan Sitiotio; Desa Bonan Dolok, Kecamatan Sianjur Mula-mula; serta beberapa desa lain di Kecamatan Sianjur Mulamula dan Sitio-Tio. Deforestasi di hulu Danau Toba juga menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan, seperti yang terjadi pada 19 November 2017 dan 2 November 2020.

Penyebab banjir-banjir bandang ini kemungkinan berkaitan dengan berbagai faktor, seperti curah hujan, perubahan iklim, kondisi sungai, dan lahan kritis. Namun, menurut penelitian kelompok studi dan pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), penurunan drastis luas hutan yang berfungsi sebagai resapan air menjadi penyebab utama. Selain itu, lokasi banjir-banjir bandang ini juga terletak di hilir atau dekat dengan konsesi PT. TPL, yang mengelola sekitar 34.817 hektar lahan di daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba, sebuah area penting bagi resapan air hujan yang mengalir melalui lereng bukit menuju aliran sungai dan membentuk Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Konversi hutan alam di DTA ini menjadi lahan perkebunan eukaliptus semakin memperburuk kondisi tersebut (Aliansi Tutup TPL, 2024).

Kesejahteraan Manusia Maupun yang Bukan Manusia

Pembelaan terhadap PT. TPL sering kali disampaikan karena keberadaannya dianggap memberikan dampak positif dan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Perusahaan ini meyakini bahwa keberlanjutan berarti menciptakan dampak positif dalam setiap kegiatan yang dilakukan, seperti yang tercermin dalam tanggung jawab sosialnya. Hingga 2021, PT. TPL telah menyalurkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 1% dari penjualan bersih setiap tahun untuk mendukung berbagai program, seperti penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan (PT. TPL, t.t.). *Social Impact Assessment* (SIA) dilakukan untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan di wilayah sekitar. Hasil SIA menunjukkan berbagai dampak positif, seperti akses lebih mudah ke sawah, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi bisnis lokal, dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain itu, PT. TPL juga mendukung pembangunan infrastruktur, seperti gedung serbaguna, jalan desa, dan irigasi sawah, serta kerjasama di bidang pertanian dengan bantuan bibit tanaman.

Gambar 1. Diagram Impact Analysis Result PT. Toba Pulp Lestari tahun 2023

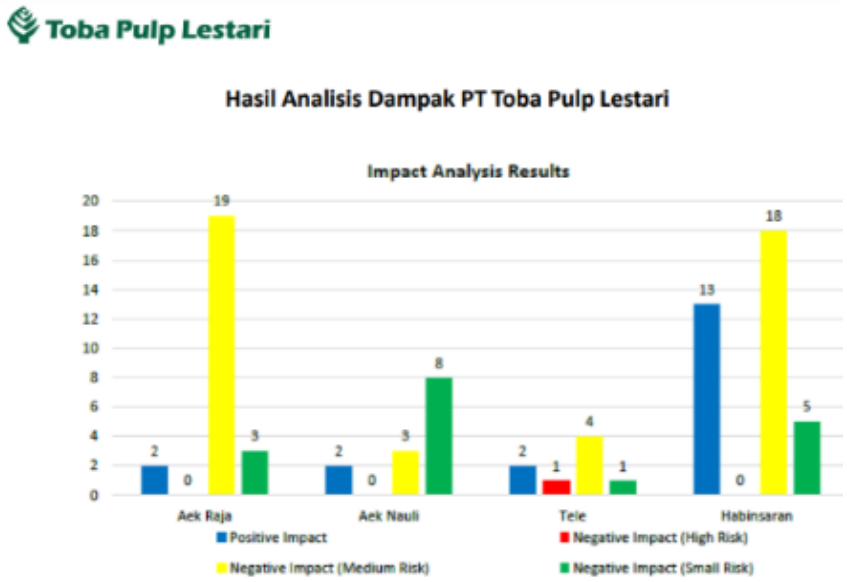

(*Sumber: https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2023/07/2.-Social-Impact-Assessment-SIA-Report_Sustainability_Updated_Ind.pdf.)*

Meskipun demikian merujuk *Diagram Impact Analysis Result* terhadap SIA menunjukkan bahwa *Negative Impact* (diagram kuning) lebih tinggi dari pada *Positive Impact* (diagram biru). Hal ini bersesuaian dengan apa yang dialami oleh masyarakat seperti oleh masyarakat Desa Pangombusan di Kabupaten Toba, di mana masalah pencemaran lingkungan, terutama udara, masih dirasakan, termasuk dampaknya pada atap seng rumah yang mengalami pengeroposan. CSR yang dicadangkan oleh PT. TPL sudah 10 tahun tidak terealisasi dengan maksimal. Serta beasiswa yang diberikan hanya berfokus pada yang akan menjadi pekerja di PT. TPL atau keluarga karyawan PT. TPL sendiri (Kusbianto dkk., 2024).

Keadilan Sosial-Budaya

Kehadiran PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) di Kawasan Danau Toba telah menimbulkan dampak panjang bagi masyarakat adat. Perusahaan ini awalnya mendapatkan izin konsesi seluas 269.060 hektar pada tahun 1992, yang kemudian direvisi menjadi 167.912 hektar pada 2020. Konflik agraria muncul akibat klaim negara atas wilayah adat dan pemberian izin konsesi kepada PT. TPL, yang hingga kini belum terselesaikan(ksppm, t.t.). Salah satu masalah utama adalah pengambilalihan tanah adat masyarakat Batak melalui transaksi jual beli yang bertentangan dengan hukum adat, dimana uang pago-pago dianggap sebagai pembayaran sah tanah, meskipun tidak sesuai dengan adat Batak.

Menurut hukum adat Batak, tanah tidak boleh diperjualbelikan secara permanen, dan transaksi yang melibatkan perusahaan kapitalis seperti PT. TPL dianggap tidak sah. Masyarakat Batak tidak pernah memberikan izin atau *pandondonhon* tanah mereka kepada perusahaan tersebut, meskipun perusahaan menganggap tanah itu miliknya secara permanen. Oleh karena itu, masyarakat Batak berhak untuk menuntut kembali tanah mereka dengan menegakkan hukum adat, yang melarang penjualan tanah secara tetap, untuk merebut kembali hak mereka yang telah diambil alih oleh perusahaan dengan dukungan pemerintah (Simanjuntak, 2020).

Bagi masyarakat Batak Toba, hutan (*harangan*) memiliki peran penting dalam pelestarian alam dan pengaturan kehidupan. Hutan tidak hanya menyediakan sumber daya alam seperti kayu untuk bangunan, kayu bakar, dan obat-obatan, tetapi juga dianggap

sebagai ruang yang memiliki penghuni dan penguasa, yang mengharuskan pengelolaannya dengan penuh tanggung jawab. Setiap kegiatan pengambilan hasil alam, seperti kayu, dilakukan dengan upacara religi dan keputusan bersama yang disepakati dalam musyawarah desa, sehingga memastikan kelestarian hutan dan ekosistem di sekitarnya (Simanjuntak, 2015). Dalam konteks deforestasi yang dilakukan oleh TPL. Maka, dengan demikian TPL telah melanggar adat Batak Toba mengenai pemanfaatan hutan (*harangan*).

Sikap Civil Society terhadap PT. TPL

Singgih memandang ranah publik dipengaruhi oleh *civil society* yang harus bertumpu pada keadilan, kebebasan, demokrasi, dan toleransi. Dalam pandangannya, meskipun hukum penting, *civil society* tidak cukup hanya berbasis pada hukum, karena hukum saja tidak menjamin ketiadaan pelanggaran HAM atau diskriminasi. *Civil society* yang ideal mencakup keseimbangan tiga poros kekuasaan: negara dalam ranah politik, pasar dalam ranah ekonomi, dan komunitas dalam ranah agama atau budaya. Ketiga poros ini harus saling bergantung tanpa saling mendominasi, seperti segitiga sama sisi yang seimbang. Ketidakseimbangan, seperti dominasi negara, dapat menyebabkan kerusakan ekonomi dan melemahkan solidaritas komunitas. Oleh karena itu, membangun *civil society* yang sehat membutuhkan upaya untuk mengembalikan keseimbangan antara ketiga poros tersebut (Singgih, 2020).

Gambar 2. Civil Society

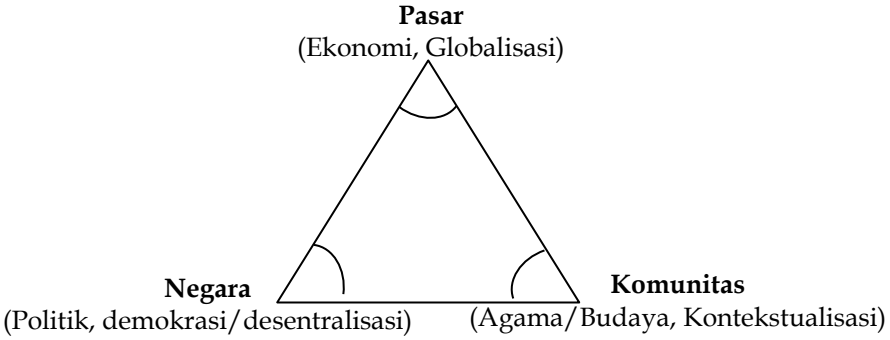

(*Sumber*: Banawiratma, 2023)

Banawiratma berpendapat bahwa tiga poros kekuasaan tersebut mempengaruhi ranah publik yang mencakup aset, barang publik, ruang publik, partisipasi sosial, layanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan lingkungan yang sehat. Semakin baik ketiga poros kekuasaan ini berfungsi, semakin tercipta masyarakat yang adil, dan ranah publik dapat dinikmati oleh seluruh warga, termasuk yang miskin dan lemah. Interaksi antara ketiga poros ini sering melibatkan berbagai konflik kepentingan. Dalam konteks yang berkembang, terutama dengan adanya disrupsi inovatif, poros pasar menjadi yang paling lincah, kreatif, dan agresif di antara ketiganya (Banawiratma, 2023).

Dalam konteks berjalannya industri PT. TPL di Kabupaten Toba, maka penulis mencoba menganalisis sikap dari ketiga poros dalam *civil society*. Pertama, Sikap Pasar yang adalah PT. TPL sendiri memberikan banyak pro-kontra selama berdirinya hingga saat ini. Kedua, Sikap Negara. Beberapa tahun terakhir sikap dari poros negara dapat dilihat telah mencoba memberikan tawaran yang baik akan tetapi belum sepenuhnya dapat terealisi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Sanksi Administratif terhadap PT. Toba Pulp Lestari (TPL) pada 3 Agustus 2021 terkait pencemaran limbah di Danau Toba. Sanksi ini mencakup 58 temuan, di mana sebagian telah diselesaikan, sementara lainnya masih dalam proses atau membutuhkan perpanjangan waktu. Menteri LHK menekankan pentingnya audit lingkungan dan sosialisasi penyelesaian masalah hutan

adat serta pencemaran limbah kepada masyarakat di Sumatera Utara (PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, t.t.). Konflik lahan adat akibat aktivitas PT. TPL juga menjadi sorotan dalam Debat Pilkada Toba 2024. KLHK telah memverifikasi hutan adat, tetapi pengakuan tertunda karena kepala daerah tidak menerbitkan SK. Pasangan calon bupati, seperti Efendi-Murphy, berkomitmen menyelesaikan konflik ini melalui langkah hukum, verifikasi, dan musyawarah untuk mengakui hak masyarakat adat secara penuh (M. Simanjuntak, t.t.).

Ketiga, Sikap Komunitas. Sikap dari komunitas masyarakat cenderung konprontatif terhadap PT. TPL. Akan tetapi, komunitas kegamaan nampaknya lebih pasif. Malahan komunitas yang berbasis gerakan masyarakat lebih dahulu mengajak Gereja HKBP yang diwakili oleh Ephorus HKBP untuk mendiskusikan krisis yang terjadi sebab merasa perlunya keikutsertaan Gereja (Hutagaol, 2022). Respon yang diberikan oleh pimpinan HKBP sebagaimana diwakili oleh Kepala Biro Jemaat dan Kepala Biro Pembinaan (2020-2024) hanya bersifat konfesional dengan merujuk pada Konfesi HKBP tahun 1996 Pasal 5 mengenai "Kebudayaan dan Lingkungan"(Biro Informasi HKBP, t.t.). HKBP belakangan mendapat sorotan karena diduga menerima dana renovasi Kantor Pusat dari PT. TPL dan bantuan lainnya untuk mendukung program HKBP. Jika terbukti ada praktek "curang", ini akan sangat disesali, mengingat sejak masa Ephorus S. A. E. Nababan dan J. R. Hutauruk, HKBP selalu berada di garis depan menentang ketidakadilan yang dilakukan oleh Indorayon/TPL (Simon, 2014).

Di lain sisi, HKBP dalam aras Resort dan Jemaat (*Huria*) di Kabupaten Toba Samosir, posisi gereja cenderung terbagi. Beberapa pendeta menyatakan dukungan kepada TPL, terutama karena bantuan yang pernah diberikan perusahaan kepada jemaat mereka. Namun, mereka menghindari membahas peran TPL dalam bencana lingkungan baru-baru ini karena ketidakpastian informasi. Di sisi lain, ada pendeta yang lebih kritis terhadap TPL, terutama mereka yang tidak lagi menerima dukungan dari perusahaan, dengan menyoroti kekurangan TPL dalam mendukung masyarakat secara menyeluruh. Ketergantungan gereja pada TPL, baik dalam bentuk lapangan kerja bagi jemaat maupun dukungan keuangan tidak langsung, serta pemahaman gereja yang terbatas tentang isu keberlanjutan lingkungan, menjadi faktor yang memperumit respons gereja terhadap perusahaan ini (Manalu, 2024).

Meskipun demikian secara konfesional, sebagaimana disebutkan di atas, HKBP dalam Konfesi 1956 pasal 4 tentang "Masyarakat" dan Pasal 5 tentang "Kebudayaan dan Lingkungan Hidup" menuntun setiap individu untuk hidup saling membantu, menjaga kesejahteraan keluarga, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas, tanpa diskriminasi gender (Gal. 6:2; Ef. 5:21). Tanggung jawab sosial kita mencakup pelayanan kepada mereka yang miskin, sakit, terbelakang, dan tertindas oleh ketidakadilan, sambil memastikan kesetaraan dalam kesempatan dan keputusan, baik di kota maupun desa (Ams. 30:10). Di sisi lain, juga dipanggil untuk memelihara bumi sebagai ciptaan Allah, bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan menanggulangi kerusakan yang disebabkan oleh eksploitasi alam dan polusi (Kej. 2:5-15; Mazm. 8:4-10; Wahyu 22:1-2) (HKBP, 2000). Oleh karena itu, merujuk kepada usulan Jordan H. Pakpahan, bahwa HKBP sebagai institusi lokal dan nasional, dalam relasinya dalam *civil society,* perlu berdialog dengan pemerintah untuk mendukung kaum miskin dan terpinggirkan melalui kebijakan yang memperbaiki kesejahteraan mereka dan menjaga lingkungan. Di Kabupaten Toba Samosir, HKBP harus menjadi gereja yang kritis, memperjuangkan keadilan sosial, dan menentang praktik korup PT Toba Pulp Lestari. Gereja juga perlu bersikap profetis, menyerukan keadilan, perdamaian, dan kelestarian ciptaan, serta memberdayakan masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu, gereja memiliki tanggung jawab mendidik generasi muda calon pemimpin melalui pendidikan politik Kristen, serta

mengatasi masalah degradasi lingkungan dan membela komunitas yang terdampak kerusakan hutan (Pakpahan, 2022).

***Human Ecological Triangle* Richard Evanoff**

Richard Evanoff mengembangkan dalam tulisannya mengenai *human ecological triangle* dalam usahanya membangun etika global. Menurutnya etika global menjadi sangat mendesak karena masalah lingkungan yang bersifat global dan keterkaitan ekonomi dunia yang semakin kompleks, di mana tindakan individu yang tampak sederhana dapat memicu konsekuensi luas yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks globalisasi, etika global harus mampu mengatasi hubungan yang saling terkait ini dengan memperluas tanggung jawab moral lintas budaya dan ekosistem. Pendekatan ini membutuhkan integrasi etika sosial dan lingkungan yang tidak hanya mengandalkan perubahan perilaku individu, tetapi juga restrukturisasi sistem sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh. Dialog lintas budaya diperlukan untuk menciptakan norma etika yang memungkinkan kerja sama lintas budaya sekaligus menghormati keberagaman, menghindari relativisme nihilistik postmodern yang mengabaikan kebutuhan transformasi sosial yang nyata. Etika global harus kritis terhadap sistem yang ada namun konstruktif dalam membangun alternatif yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh dunia (Evanoff, 2011).

Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa etika global harus muncul dari dialog inklusif, bukan prinsip universal yang kaku. Dalam demokrasi deliberatif, semua pihak yang terdampak dapat berpartisipasi secara setara untuk menyepakati norma yang mengatur hubungan manusia dan lingkungan. Ini penting untuk menghadapi tantangan global seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan, yang tidak bisa diatasi hanya dengan mekanisme pasar atau keputusan elit global. Dialog terbuka memungkinkan solusi berbasis argumen rasional, bukan sekadar kepentingan ekonomi, sehingga etika baru dapat disusun sesuai perubahan sosial dan lingkungan (Evanoff, 2011).

Evanoff mendasari etika global dengan bioregionalisme sebagai suatu pendekatan yang menggabungkan kesadaran ekologis, sosial, dan politik dalam satu kesatuan yang saling berkaitan. Paradigma bioregional sendiri, menekankan pentingnya pengalihan kekuasaan skonomi, politik, dan sosial kepada komunitas lokal sebagai respon terhadap dominasi paradigma industri yang mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa batas, sentralisasi Keputusan, dan homogenisasi budaya global. Pendekatan ini juga menolak konsumsi berlebihan dan eskplotasi sumber data lintas wilayah, serta mendukung keadilan global dengan memberdayakan masyarakat lokal, termasuk komunitas adat, untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Fokus utama bioregionalisme adalah menciptakan struktur sosial yang berakar pada komunitas lokal namun tetap terhubung secara ekologis lintas wilayah. Tidas seperti aktivisme lingkungan konvensional, bioregionalisme menekankan aksi langsung dan penciptaan alternatif nyata terhadap kerusakan ekologis dan disintegrasi sosial, dengan mengembangkan keberagaman budaya dan hayati sebagai fondasi masyarakat (Evanoff, 2017) Dalam hal ini, bioregionalisme menghidupkan kembali kearifan lokal sertra tradisi spiritual yang berfkus pada keterikan manusia dengan tempat tinggalnya.

Evanoff berpendapat bahwa, Bioregionalisme menawarkan suatu perspektif di mana nilai-nilai global tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi atau politik semata, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks lokal dan ekologis. Dalam pandangannya, bioregionalisme tidak hanya mengusung desentralisasi kekuasaan dan ekonomi yang lebih adil, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan yang lebih erat antara manusia dan alam. Etika global yang dikemukakan melalui bioregionalisme mendorong suatu kesadaran kolektif untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dengan cara yang lebih terhubung dan

saling menguntungkan, serta menantang struktur kekuasaan yang terpusat yang sering kali mengabaikan kebutuhan lokal dan keberagaman budaya (Evanoff, 2011).

Etika lingkungan, sebagai disiplin akademik, cenderung lebih fokus pada perubahan nilai pribadi dan perilaku terkait alam atau cara-cara di mana alam dihargai. Namun, yang kurang adalah kerangka kerja yang menghubungkan masalah individu, sosial, dan lingkungan secara dinamis dan ko-evolusioner, memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang interaksi manusia dengan alam. Pendekatan transaksional, yang tidak melihat individu sebagai entitas terpisah, tetapi dalam kaitannya dengan masyarakat dan alam, menekankan hubungan dialektik antara diri dan lingkungan. Pandangan ini berusaha mengatasi masalah yang dihadapi oleh etika lingkungan yang hanya memperlakukan alam sebagai "yang lain", dan lebih menekankan bahwa manusia adalah bagian dari alam yang terhubung dengan lingkungan sosialnya (Evanoff, 2011). Dalam hal ini, Evanoff memakai segitiga ekologi Steiner untuk menawarkan pemahaman tentang relasi timbal balik antara individu, masyarakat, dan alam yang berfungsi sebagai sistem rekursif yang saling mempengaruhi, mengubah kemungkinan tindakan manusia dan cara alam dipahami serta diperlakukan.

Gambar 3. Segi tiga Steiner-Evanoff

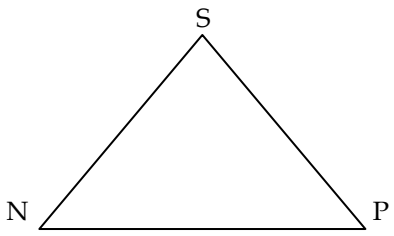

(Sumber: Evanoff, 2011)

Sakralitas Relasi Dalihan Na Tolu dalam Human Ecological Triangle

Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan tulisan ini, bahwa tujuannya adalah mengembangkan teologi publik dalam merespon dampak PT. TPL dengan pemahaman sakralitas relasi dalam Budaya Batak Toba. Oleh karena itu, dalam usaha kontekstualisasi tanpa menggantikan apa yang dikembangkan oleh Singgih, penulis melakukan pembacaan melalui konsep *Dalihan Na Tolu*. Singgih mengusulkan bahwa segitiga Steiner-Evanoff dapat dimodifikasi dalam konteks Teologi Ekologi dengan mengaitkan komponen *Nature* (Alam), *Society* (Masyarakat), dan *People* (Warga) kepada *God* (Yang Ilahi), menghasilkan hubungan GN (God-Nature), GS (God-Society), dan GP (God-People). Model ini menggambarkan hubungan yang saling melengkapi antara manusia, alam, dan Yang Ilahi, di mana ketiga elemen tetap mempertahankan otonominya masing-masing. Dalam pendekatan ini, pemahaman tentang Allah tidak hanya dipandang sebagai transenden, tetapi juga sebagai imanen, selaras dengan konsep pan-en-teisme yang melihat kehadiran Allah di dalam alam (Singgih, 2021, hlm. 229–232).

Gambar 4. Segi tiga Steiner-Evanoff-UKDW

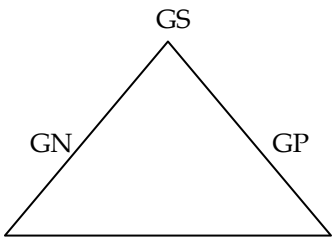

(Sumber: Singgih, 2021)

Mengapa kemudian unsur *God* (G) ini penting? Singgih menjelaskan bahwa sebelum muncul kesadaran akan keseimbangan ekologis, hubungan Allah, manusia, dan alam sering dipandang hierarkis dimana Allah di atas, manusia sebagai mahkota ciptaan, dan alam di bawah kekuasaan manusia. Namun, Kejadian 1:31 menunjukkan bahwa "Allah melihat segala yang dijadikan-Nya, sungguh amat baik," menegaskan kebaikan seluruh ciptaan. Meskipun manusia adalah gambar Allah (Kejadian 1:28; Mazmur 8:7-8), manusia dan binatang sama-sama disebut *nefesy hayah* atau "makhluk hidup." Ayat-ayat seperti Mazmur 148 dan Yepenulis 44:23 mengungkapkan bahwa alam memuji Tuhan, bukan sekadar metafora, tetapi hubungan nyata antara alam dan Sang Pencipta. Hal ini menuntut keseimbangan pandangan tentang transendensi dan imanensi Tuhan dimana Allah tidak identik dengan alam (bukan panteisme), tetapi hadir di dalam alam (panenteisme) (Singgih, 2020). Hal ini menjadi kritik terhadap pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu dan menunjukkan relasi dengan Allah, alam, dan seluruh makhluk hidup.

Konsep triadik tercermin dalam spiritualitas, kosmologi, dan tatanan sosial Batak Toba. Dalam kepercayaan adat, *Tuhan Mulajadi Na Bolon* mewujudkan diri sebagai *Batara Guru* (kekuasaan), *Soripada* (kekuatan), dan *Mangala Bulan* (otoritas pengadilan), yang disebut *Debata Na Tolu*. Ketiga aspek ini hadir dalam kosmos triadik: *Banua Ginjang* (kosmos atas, tempat tinggal Tuhan), *Banua Tonga* (kosmos tengah, tempat manusia dan makhluk non-manusia), dan *Banua* Toru (kosmos bawah, tempat roh jahat). Meskipun berbeda, ketiga banua saling terhubung dan membentuk kesatuan. Konsep ini juga tercermin dalam *dalihan na tolu*, yang menjadi dasar tatanan sosial budaya Batak Toba. *Dalihan* berarti "tungku batu," sedangkan *tolu* berarti "tiga." *Dalihan na tolu* merujuk pada tiga batu tungku yang tingginya setara untuk menjaga keseimbangan. Tatanan ini melambangkan persatuan, kesetaraan, dan persekutuan, memberikan ruang untuk saling mendukung sebagai kekuatan kolektif masyarakat Batak Toba (Marpaung, 2024).

Dalam sistem sosial *dalihan na tolu* masyarakat Batak Toba, ketiga unsur sosial: *hulahula, boru,* dan *dongan tubu* memiliki kedudukan yang setara namun masing-masing berperan sesuai dengan fungsinya dalam hubungan sosial. Meskipun pada umumnya *dalihan na tolu* hanya dipandang sebagai relasi sosial, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bungaran Antonius Simanjuntak bahwa dalam relasi ini ada unsur sakral. Hulahula sebagai pemberi istri dianggap sebagai representasi dari dewa *Batara Guru*, yang memiliki kewajiban untuk membimbing dan memberikan perlindungan, serta menjalankan peran sebagai pelindung dalam struktur sosial. Boru, sebagai penerima istri, mewakili dewa *Bala Bulan* (Mangala Bulan) dan memiliki peran untuk taat kepada hulahula dan mendukung kegiatan adat yang dilaksanakan. Dongan tubu, yang merupakan saudara semarga, menggambarkan representasi dari dewa *Batara Sori*, dan berperan untuk menjaga keharmonisan serta menyelesaikan konflik dengan bijaksana (Simanjuntak, 2009).

Walaupun ketiga unsur ini dianggap setara dalam struktur sosial *Dalihan na tolu*, sikap antara mereka diatur oleh peran yang saling menghormati, tetapi tidak bersifat hierarkis. Hulahula diharapkan untuk bersikap bijaksana dan tidak menindas boru atau dongan tubu, sedangkan boru yang memiliki kewajiban untuk mendukung hulahula, meskipun terkadang muncul rasa sakit hati, tetap wajib menjaga hubungan yang harmonis. Dongan tubu, yang berada dalam satu marga, diharapkan untuk penuh kehati-hatian dalam menjaga hubungan sosial antar sesama, karena pertikaian seringkali muncul karena masalah pembagian harta atau warisan. Dalam pandangan ini, hubungan antar ketiga unsur ini bukan hanya dilihat dari segi sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang saling berkaitan dengan kepercayaan terhadap dewa-dewa yang mewakili masing-masing unsur sosial tersebut (Simanjuntak, 2009). Nilai budaya ini dijadikan sebagai pandangan dan sekaligus tujuan hidup yang dapat dirumuskan sebagai satu rangkaian tiga kata, yaitu

kekayaan (*hamoraon*), banyak keturunan atau banyak anak (*hagabeon*), dan kehormatan (*hasangapon*) (Armawi, 2008).

Berkesesuaian dengan hal tersebut, masyarakat Batak Toba juga memahami kehidupan dan alam semesta sebagai organisme hidup yang terus berproses, dengan hubungan erat dengan yang Ilahi, baik secara langsung maupun melalui perantara-Nya yang menyatu dalam kehidupan ini. Masyarakat Batak merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam semesta melalui ritual-ritual keagamaan yang mencerminkan kewibawaan dalam menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan Tuhan. Gagasan mengenai tata aturan dan hukum adat dalam kehidupan mereka berhubungan dengan penciptaan alam semesta oleh Tuhan, yang menetapkan adat dan hukum sebagai bagian dari ciptaan-Nya untuk menjaga kelestarian eksistensinya. *Tondi* (jiwa) dipandang sebagai unsur vital yang mencerminkan kehadiran Tuhan dalam diri manusia, dengan kualitas *tondi* yang menentukan kualitas hidup seseorang dan dianggap sebagai representasi sifat ilahi yang perlu dihormati (Firmando, 2024). Penggambaran yang Ilahi pun dalam alam digambarkan dalam Budaya Batak Toba, hal ini lah yang mendorong penghormatan dalam menjaga relasi dengan alam. Ada dua personafiksai Ilahi yang dipercayai dalam alam, yaitu *Boraspati ni Tano*, dewa kesuburan tanah berwujud kadal, yang sering dipanggil dalam ritual mendirikan desa atau rumah baru, dan *Boru Saniang Naga*, dewi air berwujud ular, yang dapat memberikan perlindungan setelah diberi persembahan, meski ia dianggap berbahaya bagi mereka yang berhubungan dengan air (Vergouwen, 1964).

Atas dasar tersebut, penulis mengadopsi pemikiran Singgih berdasarkan relasi yang sakral dalam konsep *dalihan na tolu*, sebagai berikut:

Gambar 5: Segi tiga Steiner-Evanoff-UKDW: Dalihan na Tolu

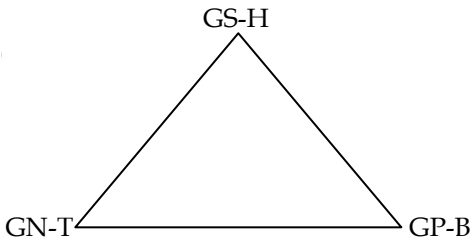

Merujuk pada konsep *Dalihan Na Tolu*, Segi tiga Steiner-Evanoff-UKDW dapat dipahami sebagai sistem relasi dalam membangun tanggung jawab kolektif, keseimbangan, dan kesetaraan, yang terus menerus berelasi dengan hubungan GN, GS, dan GP dalam teologi ekologi. Sebagaimana tiga tungku saling menopang untuk menjaga kestabilan dalam memasak, *dalihan na tolu* melambangkan sinergi antara manusia, masyarakat, dan Tuhan. *Hulahula* (pihak pemberi perempuan) mencerminkan hubungan GS yang menekankan tanggung jawab sosial dan spiritual untuk menjaga keseimbangan komunitas (GS-H). *Boru* (pihak penerima perempuan) dapat dipahami dalam konteks GP, di mana manusia berperan dalam mencerminkan kehadiran Tuhan dalam relasi interpersonal (GP-B). *Dongan Tubu* (saudara sekampung) menghubungkan GN, menggambarkan hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari kesatuan ciptaan (GN-T). Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan berinterrelasi, menciptakan tatanan teologi ekologi yang egaliter.

Berdasarkan konsep teologis ini melalui "Segi tiga Steiner-Evanoff-UKDW: *Dalihan na Tolu*", maka sikap PT. TPL sebagai GP-B dalam membangun relasinya: Pertama, terhadap ekosistem di Kabupaten Toba (GN-T). Mampu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kelemahan yang menghambat operasionalnya, termasuk dampak deforestasi dan pencemaran lingkungan terhadap masyarakat. Melalui strategi seperti peningkatan program CSR yang lebih proaktif dan penggunaan teknologi hijau, perusahaan dapat memperbaiki

citranya, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan menciptakan peluang bisnis baru. Pendekatan ini juga mencakup pengelolaan hutan yang lebih baik dan infrastruktur limbah yang memadai untuk mengurangi masalah yang dihadapi komunitas lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang (Tarigan dkk., 2019).

Kedua, terhadap masyarakat di Kabupaten Toba (GS-H). Menjamin keadilan sosial dengan melihat nilai-nilai budaya yang ada di Kawasan indusri. Berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dengan melaksanakan program pelatihan. Akan tetapi, juga aktif memantau perkembangan program CSR yang dijalankan agar berjalan efektif. Gereja HKBP sebagai bagian dari, sebagai gereja tertua di kawasan Toba dan bagian dari GS-H, memiliki visi inklusivitas yang menuntut keterbukaan dan dialog dengan agama, budaya, dan kelompok lain. Dalam konteks masyarakat Batak, *dalihan na tolu*, sebagai kearifan lokal yang mendasari sistem kekerabatan dan solidaritas sosial, menjadi kekuatan unik yang dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Kristiani sebagai relasi yang sakral (Sinaga, 2023). Gereja HKBP harus mampu memposisikan dirinya sebagai pelopor dalam membangun hubungan yang dinamis antara adat dan iman, menjadikan *dalihan na tolu* sebagai model relasi teologis untuk merespons ketegangan antara ekologi, ekonomi dan keadilan sosial.

Kesimpulan

Sakralitas relasi dalam konteks Batak Toba menjadi landasan pemahaman etis dan teologis yang menempatkan alam, masyarakat dan industri, dimana Yang Ilahi berada di dalam masing-masing unsur tersebut. Ketiganya harus memiliki relasi yang saling menopang dan setara. Relasi ini mengandung makna tanggung jawab kolektif yang menolak eksploitasi sepihak atas sumber daya alam dan mengedepankan keseimbangan sosial-ekologis. Dalam konteks ketegangan antara kepentingan industri dan kelestarian lingkungan, sakralitas relasi menjadi landasan untuk membangun tata kehidupan bersama yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikin, penguatan nilai-nilai relasional ini penting untuk mendorong transformasi praksis sosial yang berpihak pada kesejahteraan masyarajaat, keutuhan ciptaan, martabat komunitas lokal.

Daftar Referensi

Aliansi Tutup TPL. (2024, November 25). *Indorayon-Toba Pulp Lestari (TPL) Sumber Bencana bagi Masyarakat Kitaran Kaldera Toba*. https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/5/2/indorayon_toba_pulp_lestari_sumber_bencana_bagi_masyarakat_kitaran_kaldera_toba_en.pdf

Armawi, A. (2008). Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu dan Good Governance dalam Birokrasi Publik. *Jurnal Filsafat*, *18*(2), 157–166. https://doi.org/10.22146/jf.3522

Banawiratma, J. B. (Ed.). (2023). *Teologi publik dan ketidakadilan: Pembebasan holistis bagi dan bersama para korban* (Cetakan ke-1). BPK Gunung Mulia.

Biro Informasi HKBP. (t.t.). *Disebutkan pada Gerakan Masyarakat Tutup TPL: HKBP Pro-Lingkungan Alam dan Lingkungan Hidup*. Diambil 28 Desember 2024, dari https://www.hkbp.or.id/article/disebutkan-pada-gerakan-masyarakat-tutup-tpl-hkbp-pro-kelestarian-alam-dan-lingkungan-hidup

C. Simon, J. (2014). *Merayakan 'Sang Liyan': Pemikiran-Pemikiran Seputar Teologi, Eklesiologi, dan Misiologi Kontekstual*. Kanisius.

Dasril, A. (t.t.). *Mengenl Euclyptus dari Dekat, TPL buktikan Ternyata Bisa Berdampingan dengan Tanaman Lain*. Diambil 25 November 2024, dari

https://medan.viva.co.id/sumut/7677-mengenal-eucalyptus-dari-dekat-tpl-buktikan-ternyata-bisa-berdampingan-dengan-tanaman-lain

Evanoff, R. (2011). *Bioregionalism and Global Ethics*. Routledge.

Evanoff, R. (2017). Bioregionalism: A Brief Introduction and Overview. *The Aoyama Journal of International Politics, Economics and Communication*, *99*, 55–65.

Firmando, H. B. (2024). The Role of The Traditional Beliefs of the Toba Batak Community in Social Practices in the Lake Toba Region: A Review of Culture and Context. *ASKETIK*, *8*(1), 156–177. https://doi.org/10.30762/asketik.v8i1.1433

Frans Jaswin Manalu, M. (2024). Factor Analysis of The Change in Attitude of Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Towards Pt Toba Pulp Lestari (TPL) in Environmental Sustainability. *Jurnal Sosiologi Agama*, *18*(1), 33–54. https://doi.org/10.14421/jsa.2024.181-03

HKBP. (2000). *Pengakuan Iman HKBP Konfessie 1951&1996*. Percetakan HKBP.

Hutagaol, Randy. P. F. (2022, Juli 4). *ALIANSI Gerak Tutup TPL akan Undang Ephorus HKBP Pendeta Robinson Butarbutar Duduk Bersama Bahas TPL*. https://medan.tribunnews.com/2021/07/04/aliansi-gerak-tutup-tpl-akan-undang-ephorus-hkbp-pendeta-robinson-butarbutar-duduk-bersama-bahas-tpl

Indradewa, D. (2021). *Etnoagronomi Indonesia*. Lily Publisher.

ksppm, A. (t.t.). *Masyarakat Mendesak Pemerintah Mencabut Ijin Perusahaan Perusak Lingkungan di Kawasan Danau Toba*. Diambil 23 November 2024, dari https://ksppm.org/2023/02/25/masyarakat-mendesak-pemerintah-mencabut-ijn-perusahaan-perusak-lingkungan-di-kawasan-danau-toba/

Kusbianto, K., Sitompul, A., Sahputra, R., Ruslan, R., Azmi, S., Simamora, M. S., Nurhayati, N., & Satar, A. (2024). Tanggungjawab Sosial Dalam Tatakelola Perusahaan yang Baik Terhadap Masyarakat Desa Pangobusan, Kabupaten Toba. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(5), 385–392. https://doi.org/10.55681/swarna.v3i5.1308

Marpaung, F. B. S. (2024). Towards an Imaginative Friendship: A Dialogue Between the Concept of Dalihan Na Tolu and the Perichoresis of the Trinity for Christians, Muslims, and Parmalim in the Toba Batak Context. *Theologia in Loco*, *6*(2), 126–153. https://doi.org/10.55935/thilo.v6i2.285

Pakpahan, J. H. (2022). The Church's Struggle to Buid Justice for All: The Context of Multidimensional Poverty in North Sumatra, Indonesia. Dalam J. Motte, A. Parlindungan, & S. Hübner (Ed.), *Building Inclusive Communities: How Can Churches Fight against Discrimination, Exclusion and Violence?* United Evangelical Mission (UEM).

PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (t.t.). *Proses Penanganan Permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah Industri di Danau Toba*. Diambil 23 November 2024, dari https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6135/progres-penanganan-permasalahan-hutan-adat-dan-pencemaran-limbah-industri-di-danau-toba

PT. TPL. (t.t.). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Diambil 23 November 2024, dari https://www.tobapulp.com/pengembangan-masyarakat/

Simamora, E. G. (2024, Mei 9). *PT. TPL, Bukan Sahabat Masyarakat Adat*. https://tanobatak.aman.or.id/pt-tpl-bukan-sahabat-masyarakat-adat/

Simanjuntak, B. A. (2009). *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Simanjuntak, B. A. (2015). *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun* (Edisi pembaruan). Yayasan Pustaka Obor.

Simanjuntak, B. A. (2020). Karakter Bangso Batak Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan. Dalam B. A. Simanjuntak (Ed.), *Karakter Batak Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*. Obor.

Simanjuntak, M. (t.t.). *Debat Pilkada Toba: Konflik Lahan Masyarakat Adat dengan Toba Pulp Lestari Menjadi Perhatian*. Diambil 26 November 2024, dari https://www.aman.or.id/news/read/1966

Sinaga, L. (2023). Communal Ecclesiology. *QUAERENS: Journal of Theology and Christianity Studies*, *5*(1), 1–17. https://doi.org/10.46362/quaerens.v5i1.147

Singgih, E. G. (2020). *Dari Ruang Privat ke Ruang Publik: Sebuah Kumpulan Tulisan Teologi Kontekstual Emanuel Gerrit Singgih*. Kanisius.

Singgih, E. G. (2021). *Pengantar Teologi Ekologi*. Kanisius.

Siregar, M. (2020). *Unconvensional*. CV Prabu.

Tarigan, Y., Kindler, M., & Silangit, Z. A. T. (2019). Environmental and Societal Issues in Pulp Industry a Case Study of PT. Toba Pulp Lestari, Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2019)*. Proceedings of the 1st International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2019), Batam, Indonesia. https://doi.org/10.2991/icaess-19.2019.31

Vergouwen, J. C. (with Keuning, J., & Scott-Kemball, J.). (1964). *The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra*. Springer Netherlands.

Wijaya, Y. (2021). *Profitability, Solidarity, Sustainability*. TPK-UKDW.